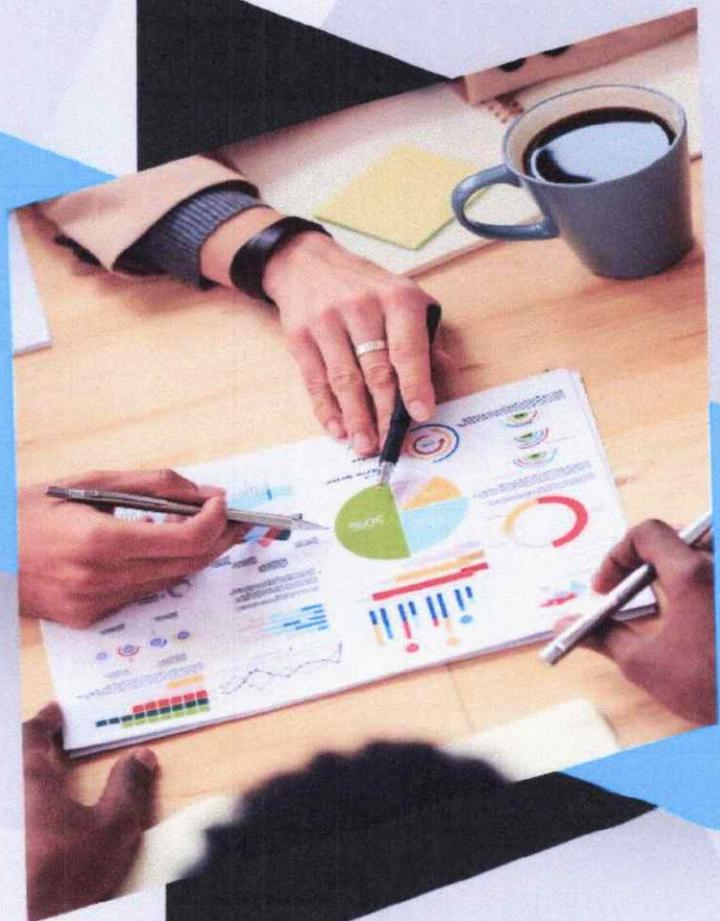




# LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

**TAHUN  
2024**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

#### LAPORAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

#### PROVINSI SUMATERA BARAT

#### TAHUN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 23 Maret 2025

Plt. Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat diselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024. Kinerja pemerintahan baik pada level daerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pada skala nasional saat ini dihadapkan suatu kondisi yang harus dicapai, yaitu menerapkan paradigma baru pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, tanggap, orientasi terhadap konsensus, partisipatif, efektifitas, efisien dan visi strategis yang kesemuanya ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat.

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro. Laporan Kinerja juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja merupakan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sepenuhnya kami menyadari, bahwa kualitas laporan ini belum sesuai dengan yang diharapkan hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen seluruh pegawai Biro dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Faktor eksternal yang bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Biro. Selain itu target indikator kinerja yang ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Administrasi Pembangunan selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan.

Hasil dari penulisan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada seluruh bagian di lingkungan Biro tentang aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing serta sejauhmana capaian kinerja dapat diwujudkan pada tahun 2024 dan menjadi acuan dimasa mendatang untuk mewujudkan peningkatan kinerja.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Padang, 13 Maret 2025  
**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**



**RIA WIJAYANTY, ST, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770413 200003 2 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran organisasi.

Memenuhi maksud tersebut diatas Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penerapan tahun kedua dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini disusun untuk mewujudkan kewajiban Biro guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi Biro dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan sasaran strategis yang menjadi target pelaksanaan kegiatan
2. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 103.66%
3. Pencapaian sasaran strategis 1 (satu) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu **Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

**Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,47% dengan Persentase realisasi 99,95%.

4. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap **Persentase Perangkat Daerah Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksanannya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Pencapaian sasaran strategis 2 (dua) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja** dengan capaian kinerja sebesar 98,20%.
6. Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap indikator kinerja yaitu **Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi** dengan capaian kinerja sebesar 105,33.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Gambaran Organisasi .....	1
a.    Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
b.    Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
c.    Struktur Organisasi.....	4
1.2    Aspek Strategis Organisasi .....	9
1.3    Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1    Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan.....	13
2.2    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1    METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	18
3.2    HASIL PENGUKURAN KINERJA.....	20
I.    Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal .....	20
3.3    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024 .....	21
I.    Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal .....	21
II.   Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi .....	38
III.  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi .....	52
3.4    REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024 .....	62
BAB IV PENUTUP .....	67

4.1	Kesimpulan .....	67
4.2	Permasalahan dan Kendala .....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024 .....	8
Tabel 2. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021 - 2026 .....	13
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel 2.2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	15
Tabel 2.2. 2 Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 2.2. 3 Perbandingan Anggaran Sebelum Perubahan Dan Setelah Perubahan Tahun 2024 .....	17
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	19
Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administarsi Pembangunan Tahun 2024.....	20
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal.....	24
Tabel 3. 4 Statistika Evidence Januari Sampai Desember Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 5 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023 Dan 2024 .....	28
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2024 Dengan Akhir Rpjmd/Renstra Tahun 2021-2026.....	30

Tabel 3. 7 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021 S.D 2024.....	31
Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan T.A 2024 .	35
Tabel 3. 9 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2004 Pada Sasaran Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal.....	37
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis li.....	39
Tabel 3. 11 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis li Tahun 2023 Dan 2024 .....	41
Tabel 3. 12 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis li Tahun 2021 S.D 2024.....	43
Tabel 3. 13 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Mendukung Sasaran li “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”.....	50
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran lii.....	53
Tabel 3. 15 Tabel Rekapitulasi Kuisisioner.....	55
Tabel 3. 16 Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabilitas Kinerja Dan Melayani Tahun 2024 .....	57
Tabel 3. 17 Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis lii Tahun 2023 Dan 2024.....	57
Tabel 3. 18 Perbandingan Target Dan Realisasi Sasaran lii Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2021 S.D 2024 Dengan Dokumen Renstra.....	58
Tabel 3. 19 Tabel Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran lii Tahun 2021 S.D 2024 .....	60

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	62
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024...	64

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024.....	9
Grafik 2 Sasaran Strategis I Tahun 2021 s.d 2024 .....	32
Grafik 3 Sasaran Strategis II Tahun 2021 s.d 2024 .....	48
Grafik 4 Sasaran Strategis III Tahun 2022 s.d 2024 .....	61
Grafik 5 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	65

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Organisasi

### a. Dasar Pembentukan Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan adalah salah satu Biro dari 9 (sembilan) Biro yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan awal dari Biro-Biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Administrasi Pembangunan merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pengendalian administrasi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan dasar terbentuknya Nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Nomenklatur Biro Administrasi Pembangunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan di perbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023

tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

##### 1. Kedudukan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan

##### 2. Tugas Pokok

Tugas pokok Biro Administrasi Pembangunan *“membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan”*.

##### 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, biro mempunyai fungsi :

- a) Mendorong Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- b) Menjadikan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib dan kondusif;
- c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja serta Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
- d) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Pembaunangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 2) penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
- 3) penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

**c. Struktur Organisasi**

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala dan Bagian 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana dengan tugas sebagai berikut :

**1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**

**Daerah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi

Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan perlengkapan biro;

- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

**2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah;
- b. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

**3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pembangunan.

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

##### **1) Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan kinerja yang berkualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2024, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki Aparatur Sipil Negara sebanyak 21 orang dan 6 Non Aparatur Sipil Negara dengan total seluruh pegawai 27 orang. Adapun rincian sebagai berikut 5 orang struktural, 5 orang fungsional penyetaraan, 11 orang pelaksana. Selain itu Biro Administrasi

Pembangunan dibantu 4 orang tenaga kontrak dan 2 orang tenaga IT kontrak. Dari 4 orang tenaga kontrak tersebut 2 orang tenaga kontrak dari Biro Umum yang diperbantukan pada Biro Administrasi Pembangunan. Pada tabel 1.1. dan grafik 1.1. berikut dapat dilihat kekuatan pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan.

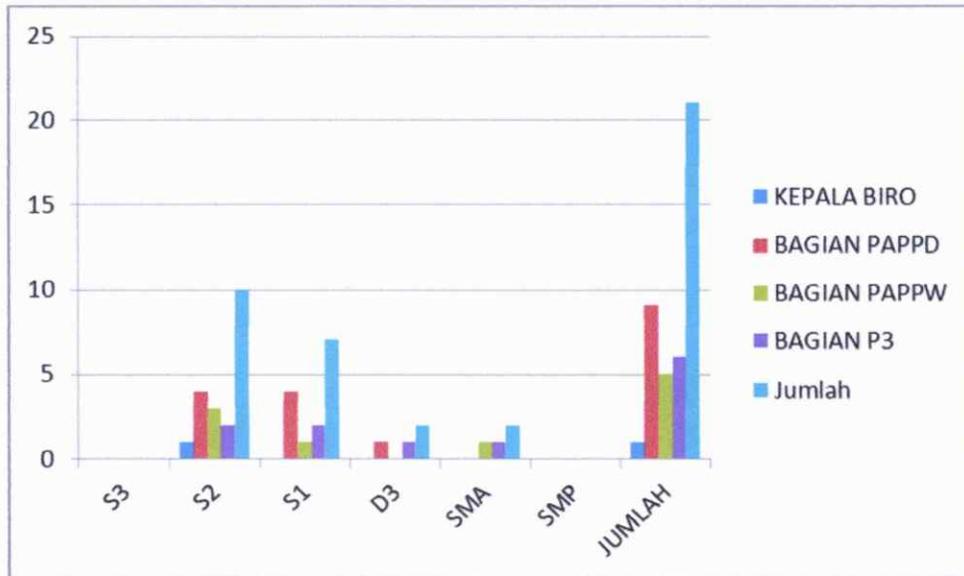
**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2024**

No.	URAIAN	PENDIDIKAN						JML
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1.	Kepala Biro	0	1	0	0	0	0	1
2.	Bagian PAPPD	0	4	4	1	0	0	9
3.	Bagian PAPPW	0	3	1	0	1	0	5
4.	Bagian P3	0	2	2	1	1	0	6
	JUMLAH	0	10	7	2	2	0	21

*Sumber : Biro Adminitrasi Pembangunan Setda Prov. Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.1. di atas dapat dilihat, pada tahun 2024 pegawai di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat 47% berpendidikan S2 atau sebanyak 10 orang, 33% berpendidikan S1 atau sebanyak 7 orang, 9% berpendidikan D3 atau sebanyak 2 orang dan 9% berpendidikan SMU atau sebanyak 2 orang. Pegawai tersebut tersebar di 3 bagian yang ada dilingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat.

**Grafik 1**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Biro Administrasi Pembangunan**  
**Tahun 2024**



## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD
- b. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Kementerian/Lembaga dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBN
- c. Koordinasi dengan SKPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten/Kota
- d. Rapat evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota

- f. Koordinasi dengan SKPD terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan kebijakan pembangunan
- g. Penerapan aplikasi monitoring dan evaluasi untuk efektifitas dan efisiensi pengendalian pembangunan Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan peran aspek strategis tersebut juga di dukung dengan arah kebijakan yang tertuang didalam Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD sesuai dengan target
- b. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBN sesuai dengan target
- c. Meningkatkan pembinaan ke Kabupaten/Kota
- d. Meningkatkan realisasi fisik dan keuangan APBD yang anggaran APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota
- e. Meningkatkan pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD/APBN/APBD Kabupaten/Kota yang efisien
- f. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan terkait pengendalian pembangunan
- g. Meningkatkan pengendalian administrasi pembangunan secara efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Biro Administarsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian Misi 7 (tujuh) **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Untuk mendukung kinerja Biro Administarsi Pembangunan dalam pencapaian Misi 7 (tujuh) tersebut dilakukan melalui 1 Program yaitu **“ Program Kebijakan Administrasi Pembangunan “**

Pada saat ini Biro Administrasi Pembangunan terdapat 3 (tiga) Sasaran Startegis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Adapun yang menjadi permasalahan utama dan menjadi indikator sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu ***Persentasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.***

Biro Administrasi Pembangunan bertujuan “ *bagaimana seluruh Perangkat Daerah ( PD Provinsi Sumatera Barat ) dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan tertib administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari dana APBD dan APBN* “.

### **1.3 Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Biro Administrasi Pembangunan masih dihadapi pada berbagai permasalahan antara lain :

- a. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. Monev yang dilaksanakan hanya menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada. Sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah sampel monev yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi faktor kesalahan dalam mengambil kesimpulan masalah-masalah pembangunan.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian pelaksanaan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelaporan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.
- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan

kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.

- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar update dan valid
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- k. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- l. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinnya sampai **pada batas waktu yang telah ditentukan.**
- m. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengentahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- n. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisais keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- o. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
- p. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah berdasarkan kepada **Misi 7** yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** “ dengan tujuan

**“ Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani “**

**Dengan Sasaran “ Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel “**

Berdasarkan Visi dan Misi uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selama periode Renstra 2021 – 2026 dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan yang optimal	1 Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	90	91	92	93	94	95
		2 Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN	90	91	92	93	94	95
		3 Rekomendasi yang ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan Biro Administrasi Pembangunan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, target kinerja hasil (outcome). Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dapat diuraikan dalam table berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan	Mewujudkan pengendalian pembangunan yang optimal	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari Pembangunan instansi yang lebih tinggi kepada Pembangunan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen terhadap amanah yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan penapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai unsur evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah di susun dan ditandatangani oleh

Kepala Biro Administrasi Pembangunan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 April 2024. Pada Biro-biro penandatanganan Perjanjian kinerja dilakukan antara Kepala Biro dan Sekretaris Daerah selanjutnya untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah bersama Gubernur Sumatera Barat. Perjanjian kinerja selanjutnya dijabarkan (cascading) menjadi kinerja seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada table berikut :

**Tabel 2.2. 1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	93 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB ( 72 )
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	SB (83,31)

Dari tabel 2.2.1 terhadap Perjanjian Kinerja 2024 dapat dijelaskan terkait Sasaran ke 3 (tiga) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi memiliki target 83,31 (SB) sedangkan pada Rencana Strategis 2021-2026 Biro Administrasi Pembangunan memiliki target 89 (SB). Terjadinya penurunan target Sasaran Strategis 3 disebabkan realisasi target pada tahun 2023 sebesar 85 (SB) yang dapat diartikan bahwa kenaikan realisasi tidak terlalu signifikan sehingga untuk tahun 2024 target disesuaikan dengan evaluasi tahun lalu.

Terdapat sedikit perbedaan sasaran strategis pada Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja disebabkan karena pengertian pengendalian pembangunan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi biro. Setelah dilakukan koordinasi dengan Biro Organisasi pada saat penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Biro kalimat Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro, sehingga disarankan untuk menambah kata Administrasi. Sehingga sasaran strategis menjadi “Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal “ .

Adapun dalam melaksanakan perjanjian kinerja tersebut Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2024 juga didukung oleh anggaran, anggaran dibawah ini merupakan anggaran perubahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2. 2**  
**Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.418.822.301</b>
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.949.800
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.359.000
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.710.000
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.800.000
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915.400.363
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.020.936
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.190.000
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1.370.375.350</b>
II.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	83.693.850
II.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	634.981.400.
<b>J U M L A H</b>		<b>2.787.197.651</b>

Table dibawah ini merupakan perbandingan anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan tahun 2024 :

**Tabel 2.2. 3**  
**Perbandingan Anggaran Sebelum Perubahan dan Setelah Perubahan Tahun 2024**

No.	PROGRAM	ANGGARAN		SELISIH	KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.445.491.801	1.418.822.301	28.589.500	APBD
2	Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.541.705.850	1.370.375.350	171.330.500	APBD
TOTAL		2.987.197.651	2.787.197.651	200.000.000	

Terjadinya pengurangan anggaran untuk tahun 2024 dikarenakan terjadinya kekurangan anggaran secara keseluruhan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga seluruh Perangkat Daerah mendapat refocusing anggaran.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

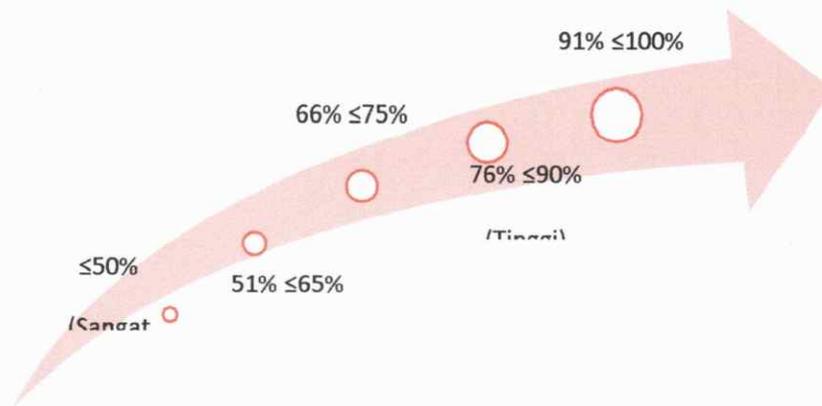
- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Atau dapat juga dengan menggunakan skala peringkat kinerja sebagai bentuk untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3. 1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 55%	Sangat Rendah	

Pengukuran kinerja sebagaimana tabel tersebut di atas, mengacu kepada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pencapaian kinerja sasaran dapat dikatakan berhasil jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan > **76 %**.

## 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

### I. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal

Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Berikut rekapitulasi realisasi indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 :

**Tabel 3. 2**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Biro Administarsi Pembangunan Tahun 2024**

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	93%	99.95%	107.47	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (72)	BB (70.71)	98.20	Sangat Tinggi	
3.	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (83,31)	SB (89,53)	107.46	Sangat Tinggi	
<b>Jumlah Capaian</b> .....						313.13		
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja</b> .....						104.37	Sangat Tinggi	

Sumber : Hasil Analisis Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan indikator kinerja termasuk kategori berhasil dengan kriteria tingkat capaian kinerja sangat tinggi. Seperti pada Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan nilai target 93% dengan capaian realisasi nilai 99,95% dengan capaian 107,47% dengan kriterianya **Sangat Tinggi**. Selanjutnya Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD nilai target kinerja 72 (BB) dengan realisasi sebesar 70,71 (BB) dimana capaiannya sebesar 98,20% dengan kriteria

**Sangat Tinggi.** Untuk Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan targetnya 83.31 (SB) dan realisasi 89.,53 (SB) dimana capaian sebesar 107,46% dengan kriteria **Sangat Baik**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas diketahui bahwa 3 indikator kinerja sasaran strategis tercapai dengan range 91% ≤ 100%. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 104,37% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa upaya-upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan Sumatera Barat melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 telah dilakukan dengan klasifikasi berhasil dengan kategori **Sangat Tinggi**.

### **3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 dengan realisasinya selama tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

#### **I. Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah dasar

terbentuknya Biro Administrasi Pembangunan. Selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan di perbaharui dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun Tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan "*membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*".

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut maka Biro Administrasi Pembangunan juga diberikan target dan indikator pengendalian administrasi pembangunan. Dimana hal ini juga sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu pada misi 7 (tujuh). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi Kepala Daerah yaitu **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan** yang didukung melalui 7 misi. Pada Misi ke 7 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas**, yang memiliki tujuan terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani yang diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi, Kepala Daerah merumuskan 3 sasaran kinerja yang salah satunya yaitu terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Pembangunan diberikan tujuan yaitu melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang didukung oleh 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

#### **a. Dasar Penetapan Indikator Kinerja**

Biro Administrasi Pembangunan mendukung misi 7 (tujuh) pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas yang juga ditetapkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan sasaran strategis pertama yaitu *Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal*.

Target untuk Tahun 2024 pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang juga sudah dituangkan pada Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan nilai 93% dan juga diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024.

#### **b. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis ini memiliki Indikator kinerja yaitu Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan artian bahwa pada Biro Administrasi Pembangunan terdapat pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria	Kode
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	93	99.95	107.47	Sangat Tinggi	
<b>Rata-rata capaian indikator kinerja</b>					<b>107,47</b>	Sangat Tinggi	

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 107,47% dengan kategori **sangat tinggi**. Pencapaian Indeks Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target 93% dengan realisasi 99,95% di tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan maka Biro Administrasi Pembangunan yang telah dilakukan termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dengan nilai 99,95%. Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi Simbangda yang mana Biro Administrasi Pembangunan sebagai Perangkat Daerah di Provinsi melakukan pengendalian administrasi pembangunan dengan melakukan validasi setiap evidence yang disampaikan Perangkat Daerah dan menjadi bukti tertib pelaksanaan administrasi.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, dapat diuraikan sebagai berikut:

**a). Sumber Data**

Data bersumber dari Aplikasi Simbangda Berbasis Evidence yang menjadi acuan dalam memperoleh hasil penginputan pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan laporan yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya. Dari penginputan

yang dilakukan Perangkat Daerah akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh helpdesk terhadap evidence yang di upload, dari hasil upload tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh helpdesk Biro Administrasi Pembangunan. Hasil verifikasi dan validasi menghasilkan data realisasi fisik dan keuangan masing-masing sub kegiatan serta **Tabel Statistik Evidence** sebagai hasil disetujui atau tidak disetujuinya evidence yang di upload. Tabel Statistik Evidence merupakan hasil dari evidence/dokumen-dokumen yang sudah diupload dan disetujui keabsahan dokumen sebagai bukti dukung kegiatan oleh operator masing-masing Perangkat Daerah. Data dari tabel statistik evidence tersebut diperoleh hasil Indikator kinerja dari Sasaran Strategis Pertama yaitu "**Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**".

#### **b). Metodologi Perhitungan**

Untuk memperoleh angka Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dilakukan dengan cara penginputan dokumen pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 oleh setiap operator Perangkat Daerah dan selanjutnya di verifikasi dan validasi oleh helpdesk masing-masing perangkat daerah. Adapun tahapan penginputan yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah ( PD Provinsi Sumatera Barat ) sebagai berikut :

- i. Upload Data Perencanaan yang terdiri dari : KAK, RUP, HPS, Rapat-rapat persiapan awal kegiatan.
- ii. Upload Data Pelaksanaan yang terdiri dari : Kontrak, SK Tim, Dokumen lelang, dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, rapat-rapat pelaksanaan kegiatan
- iii. Upload Data Pelaporan yang terdiri dari : laporan serah terima kegiatan, Laporan Akhir masing-masing sub kegiatan
- iv. Ketepatan waktu masing-masing OPD melaksanakan upload evidence pada aplikasi Simbangda ( paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya).

Hasil penginputan tersebut akan di verifikasi dan validasi oleh helpdesk dan selanjutnya hasil yang disetujui hasil validasi akan muncul pada tabel statistik evidence seperti tabel berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Statistika Evidence Januari sampai Desember Tahun 2024**

**Statistika evidence**  
**Januari sampai Desember**  
**Tahun 2024**

No	SKPD	Helpdesk	Total paket	Evidence				
				Di Upload	Belum Validasi		Disetujui	Ditolak
					Swakelola	Penyedia		
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Yoval Eka Putra	65	550	0	0	550	0
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	88	751	0	0	751	0
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Rahmi Dewi , ST, MM	50	286	3	0	283	0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Yoval Eka Putra	50	427	0	0	427	0
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	51	550	0	0	550	0
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Yoval Eka Putra, SH	75	560	0	0	560	0
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1. Yoval Eka Putra, SH	3	27	0	0	27	0
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Yoval Eka Putra	80	677	0	0	677	0
9	BADAN PENGHUBUNG	1. Yoval Eka Putra	47	377	0	0	374	3
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Niswen, A.Md	94	806	0	0	806	0
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. Yoval Eka Putra	33	260	0	0	260	0
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	1. DELVI SUKRI	69	558	0	0	558	0
13	BIRO HUKUM	1. M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	52	430	0	0	430	0
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Zulkifli	48	415	0	0	415	0
15	BIRO ORGANISASI	1. Niswen, A.Md	36	327	0	0	327	0
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Rahmi Dewi , ST, MM	67	572	0	0	572	0
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1. Akmal Rusli, SE	33	281	0	0	281	0
18	BIRO PEREKONOMIAN	1. Laura Nurwinda	66	573	0	0	573	0
19	BIRO UMUM	1. Zulkifli	140	1371	0	0	1371	0
20	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	1. FEBI FORTUNA, S.STP	328	3474	0	0	3474	0
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. FEBI FORTUNA, S.STP	47	399	0	0	399	0
22	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1. Niswen, A.Md	63	454	0	0	454	0
23	DINAS KEBUDAYAAN	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	105	848	0	0	846	2
24	DINAS KEHUTANAN	1. Ibnu Razi Putra Dasril, S.STP, M.M	435	3518	0	0	3518	0
25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Yoval Eka Putra	183	1567	0	0	1567	0

26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Yoval Eka Putra, SH	48	375	0	0	375	0
27	DINAS KESEHATAN	1. Rahmi Dewi , ST, MM	160	1245	0	0	1244	0
28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	1. DELVI SUKRI	89	825	0	0	825	0
29	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	97	981	0	0	981	0
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	146	1325	0	0	1325	0
31	DINAS PANGAN	1. Akmal Rusli, SE	87	522	7	6	506	3
32	DINAS PARIWISATA	1. Ekho Wisa	79	633	0	0	633	0
33	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Rahmi Dewi , ST, MM	65	439	11	3	424	1
34	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. DELVI SUKRI	71	603	0	0	603	0
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	105	959	0	0	959	0
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	46	536	0	0	536	0
37	DINAS PENDIDIKAN	1. MUHAMMAD FAJRI ZALMI, S.STP, M.Si	1167	7365	0	0	7364	1
38	DINAS PERHUBUNGAN	1. Akmal Rusli, SE	70	514	0	0	514	0
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Zelfi Mallinda	124	1020	0	0	1020	0
40	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1. SYUKRI PTER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	294	1846	0	0	1846	0
41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. SYUKRI PTER NUGRAHA, S.STP, M.I.Kom	800	5101	0	0	5100	1
42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	199	1512	0	0	1512	0
43	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. M IKHSAN NOVIANDI, S.STP, M.Si	35	275	0	0	275	0
44	DINAS SOSIAL	1. DELVI SUKRI	412	2976	0	0	2974	2
45	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	1. Akmal Rusli, SE	321	2691	0	0	2689	2
46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. ARRENDY IKHSAN, S.STP	73	488	0	0	488	0
47	INSPEKTORAT	1. Yoval Eka Putra, SH	65	562	0	0	562	0
48	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	1. SYAHRIAL MUIS	20	173	0	0	173	0
49	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	1. SYAHRIAL MUIS	37	306	0	0	306	0
50	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1. SYAHRIAL MUIS	21	233	0	0	233	0
51	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1. SYAHRIAL MUIS	14	170	0	0	170	0
52	SEKRETARIAT DPRD	1. Lisma Oktavia, SE, M.Si	82	584	0	0	584	0
Total			7035	54317	21	9	54271	15

Berdasarkan tabel statistika evidence diatas dapat dihitung Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} = \frac{\text{JUMLAH EVIDENCE DISETUJUI}}{\text{JUMLAH EVIDENCE YANG DI UPLOAD}} \times 100\%$$

$$\frac{54271}{54317} \times 100\% = 99,91 \%$$

$$\text{REALISASI TERTIB ADMINISTASI KAB/KOTA} = \frac{\text{JUMAH KAB/KOTA PENYAMPAIAN LAPORAN FISIK DAN KEU}}{\text{JUMLAH SELURUH KAB/KOTA}} \times 100\%$$

$$\frac{19 \text{ kab/kota}}{19 \text{ kab/kota}} \times 100\% = 100 \%$$

Total Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut :

$$\frac{\text{TOTAL REALISASI TERTIB ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH} + \text{REALISASI TERTIB ADMINISTRASI KAB/KOTA}}{2} = \frac{99,91 + 100}{2} = 99,95 \%$$

Hasil akhir dari penginputan evidence pada aplikasi Simbangda akan menjadi hasil akhir dari bukti pelaksanaan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan di lingkup Perangkat Daerah Provinsi. Setiap melakukan input evidence kegiatan akan menghasilkan capaian realisasi fisik dan keuangan setiap pelaksanaan sub kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang dapat juga menjadi pedoman dalam melihat capaian pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan masih melaporkan secara manual ke Biro Administrasi Pembangunan dengan batas waktu tanggal 10 setiap bulannya.

#### b. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Realisasi dari indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. 5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis I Tahun 2023 dan 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja 2023			Kinerja 2024			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	92%	98.62%	107.19%	93%	99.95%	107.47%	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					107.19%			107.47%	
Kriteria Penilaian									Sangat Tinggi

Dari tabel yang disajikan diatas dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2023 pada sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan memiliki target kinerja 92% dengan realisasi sebesar 98.62% dengan artian kategori “Baik” serta capaian kinerja 107.19% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Sedangkan tahun 2024 memiliki target kinerja sebesar 93% dengan realisasi sebesar 99.95% dengan kategori “Baik” serta dengan capaian kinerja sebesar 107.47% yang dapat diartikan dengan kriteria “Sangat Tinggi”.

**c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada dokumen Rensta**

Sesuai dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Taun 2021-2026, bahwa sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan “***Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal***” adalah mendukung tercapainya sasaran kepala daerah Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 3. 6**  
**Perbandingan Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan**  
**Yang Optimal Tahun 2024 dengan Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024 (%)			Target Akhir	Capaian s.d Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD/Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	93	99.95	107.47	95%	105.21
Rata-rata capaian kinerja					107,47		105.21

Capaian kinerja Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Tahun 2024 telah melebihi target Renstra/RPJMD dengan angka sebesar 107,47%. Sedangkan sampai akhir capaian RPJMD dan Renstra, Capaian Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal hanya sebesar 105,21%.

**d. Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional**

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariata Daerah Provinsi Sumatera Barat mengingat tidak memiliki pembanding pada tingkat nasional sehingga tidak dapat dibuatkan Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Standar Nasional.

e. Perkembangan Indikator Kinerja Dari Tahun 2021 s.d 2024

**Tabel 3. 7**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran**  
**Strategis I Tahun 2021 s.d 2024**

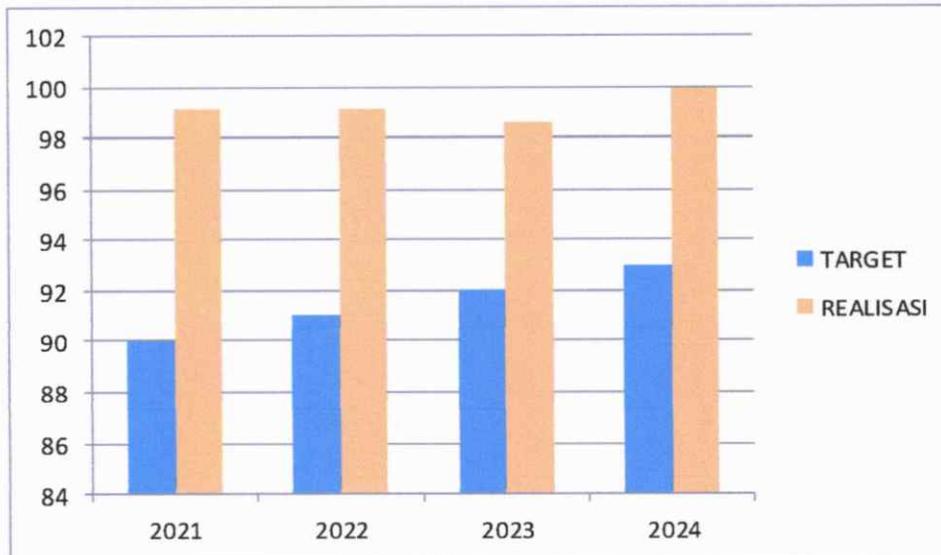
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian (%)				Ket
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	NA	90	91	92	93	99.15	99.13	98.62	99.95	110.16	108.93	107.19	107.47	
Jumlah Capaian Indikator Kinerja											110.16	108.93	107.19	107.47	
Kriteria Penilaian											Sangat Tinggi				

Realisasi indikator kinerja *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tercantum pada tabel diatas, hal ini disebabkan karena masih kurang penginputan eviden kegiatan sebagai bukti keabsahan kegiatan dan juga dapat menghitung realisasi fisik dan keuangan kegiatan. Kondisi ini juga sangat mendukung sekali terhadap tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.. Walaupun mengalami penurunan angka realisasi indikator kinerja tetapi masih tetap melebihi target yang sudah ditetapkan setiap tahunnya sehingga capaian dari indikator kinerja tetap memiliki kriteria “Sangat Tinggi” setiap tahunnya.

Hasil capaian indikator kinerja Tahun 2024 mencapai 107,47% mengalami sedikit kenaikan dari pada tahun 2023 yang mencapai 107,19%, hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 para pelaksana kegiatan sudah mulai aktif untuk melaporkan evidence pekerjaan dan menyebabkan mulai terkendalanya adminitrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat sehingga mempengaruhi juga terhadap pelaksanaan tertib administrasi pembangunan yang menjadi target kinerja ke Biro Administrasi Pembangunan.

*Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* dapat dilihat tingkat keberhasilan pada grafik dibawah ini :

**Grafik 2**  
**Sasaran Strategis I Tahun 2021 s.d 2024**



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa target dan realisasi sasaran Pertama dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan* sudah melebihi target setiap tahunnya.

**f. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan**

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam melakukan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan tercapaianya realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan melalui upaya sebagai berikut :

- 1) Memastikan setiap saat Perangkat Daerah melakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib

pelaksanaan administrasi pembangunan aplikasi Simbangda. Untuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 30 atau 31 setiap bulannya sudah upload evidence, sedangkan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 10 setiap bulannya laporan sudah sampai ke Biro Administarsi Pembangunan.

- 2) Melaksanakan rapat evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya mulai dari lingkup asisten dan dilanjutkan rapat Pembangunan yang langsung dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap paket-paket pekerjaan untuk memperkecil/mengurangi terjadinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, pekerjaan yang tidak selesai tahun sebelumnya sehingga tahun berlangsung dapat melaksanakan pekerjaan tepat waktu.
- 4) Melaksanakan koordinasi, montoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan DAK, Dekon dan TP secara berkala lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat..
- 5) Melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap capaian pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari APBD, APBN termasuk DAK, Dekon dan TP serta kontrol pelaksanaan kegiatan dan Bantuan Keuangan Khusus ( BKK ) bagi Kabupaten/Kota.

**Dalam mengurangi dampak resiko tidak optimalnya capaian kinerja di tahun 2024**, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternative tindak lanjut sebagai baerikut :

- 1) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD secara berkala dengan melibatkan Tim Terpadu
- 2) Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan secara berkala dan secara bertingkat (Rapat Teknis, Rapat per Asisten dan Rapat Pembangunan)

- 3) Monitoring dan Evaluasi secara terpadu dengan OPD lainnya terhadap kegiatan sepanjang dibutuhkan bagi dengan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maupun dengan Pemerintah Kabupetn/Kota.
- 4) Fasilitasi melalui desk pengendalian untuk masing-masing OPD penerima dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara berkala
- 5) Koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Keuangan untuk harmonisasi data realisasi DAK, Dekon dan TP secara berkala

**g. Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal, diperlukan sumber daya yang memadai mencakup :

1. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

Dalam mencapai target kinerja sasaran Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh ketersediaan 3 orang pejabat struktural selaku pelaksanaan kegiatan dan dibantu oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda 3 orang dan Perencana Ahli Muda 3 orang dalam melakukan analisis dan melaksanakan kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didukung dengan sarana kompoter dengan menggunakan Aplikasi Simbangda berbasis evidence.

### 3. Ketersediaan Anggaran Yang Efektif

Dalam rangka mencapai keberhasilan sasaran strategis Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal Biro Administrasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dengan target 93% pada tahun 2024 yang telah tercapai sebesar 99.91 % untuk Perangkat Daerah dan 100%, sehingga diperoleh subtotal Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah 99,95% dengan capaian kinerja dari kedua capaian kinerja indikator sebesar **107,47%**. Untuk mewujudkan sasaran tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 1.370.375.350,- dengan realisasi sebesar 1.160.009.660,- atau sebesar 84,65%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 8**  
**Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan T.A 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBDP 2024	REALISASI		
			Fisik	Keuangan	%
1	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>1,370,375,350</b>	<b>100</b>	<b>1,160,009,660</b>	<b>84.65</b>
1	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>835,393,950</b>	<b>100</b>	<b>708,234,092</b>	<b>84.78</b>
1.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	240,601,400	100	188,131,953	78.19
1.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	217,035,300	100	196,397,614	90.49
1.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	377,757,250	100	323,704,525	85.69
2	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>534,981,400</b>	<b>100</b>	<b>451,775,568</b>	<b>84.45</b>
2.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	54,661,200	100	40,493,500	74.08
2.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	287,991,450	100	267,739,499	92.97
2.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	192,328,750	100	143,542,569	74.63

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 1.370.375.350

CK = Capaian Kinerja (%) = 107,47%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 1.160.009.660

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.1.370.375.350} \times 107,47\%) - \text{Rp. 1.160.009.660}}{\text{Rp. 1.370.375.350}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{147.274.238.864,5 - 1.160.009.660}{\text{Rp. 1.370.375.350}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 107.05 \%$$

Dibawah ini cara penghitungan efisiensi:

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	
				$\frac{(\text{Anggaran} \times \text{Rata-rata Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%) $\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} \times 50)$
Sasaran 1	1.370.375.350	1.160.009.660	107.47%	0.23	107.05%

Dari pagu anggaran untuk Sasaran I sebesar Rp. 1.370.375.350,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.160.009.660,- dan capaian kinerja mencapai 107,47%. Dalam melaksanakan Sasaran I Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 210.365.690,- (15.35%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja Sasaran I "Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pembangunan Yang Optimal" dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai efisiensi sebesar 107.05% dengan anggaran yang tersedia diperoleh nilai efisiensi 0.23 yang artinya

dengan anggaran Rp. 1.370.375.350 Biro Administrasi Pembangunan termasuk dapat menggunakan anggaran dengan efisien.

Efisiensi yang dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap penggunaan kertas, mengurangi rapat-rapat secara langsung dan melakukan perjalanan dinas sesuai penting tidaknya perjalanan dinas yang dilakukan.

**Tabel 3. 9**  
**Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2004 Pada Sasaran Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	CAPAIAN (%)	
Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		Kebijakan administrasi pembangunan yang dihasilkan			922,424,743	876,465,968	95.02	
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD						
				Persentase realisasi fisik dan keuangan APBN						
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat	93%	Fisik :100 Keu : 84.78	835.393.950	708.234.092	84.78	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sumbar	93%	Fisik :100 Keu : 79.19	240.601.400	118,131.953	78.19	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Persentase realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN	93%	Fisik :100 Keu : 90.49	217.035.300	196.397.614	90.49	
			Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	Persentase realisasi fisik dan keuangan yang bersumber dari APBD Kab/Kota, dana APBN yang diterima Kab/Kota	93%	Fisik : 100 Keu : 85.69	377.757.250	323.704.525	85.69	

			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi fisik dan keuangan SKPD Prov. Dan Presentase kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan target	93 %	Fisik :100 Keu : 84,45	534.981.400	451.775.568	84.45
			Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah hasil analisa triwulan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah	4 dok	4 dok	54.661.200	40.493.500	74.08
			Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan bulanan, triwulan dan tahunan pelaksanaan pembangunan daerah	12 dok, 4 dok dan 1 dok	12 dok, 4 dok dan 1 dok	287.991.450	267.739.499	92.97
			Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah rumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	2 dok	2 dok	192.328.750	143.542.569	74.63

Sumber data : Realisasi rencana aksi kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumbar

## II. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam

suatu perencanaan strategis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada Tata Kelola Organisasi.

### **Dasar Penetapan Indikator Kinerja**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan wujud dari pencapaian misi ke tujuh pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dimana sasaran ini dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Sasaran ini merupakan hasil dari evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Target untuk Tahun 2024 pada sasaran ini ditetapkan berdasarkan dari Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan target nilai BB (72) dan juga diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024.

Sasaran Strategis ini memiliki Indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD yang nilainya didapat dari evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3. 10**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	72 (BB)	70,71 (BB)	98,20

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 98,20%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis ini akan diuraikan sebagai berikut :

Tujuan ke-2 Renstra Biro ADministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur melalui 2 indikator kinerja tujuan yaitu

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan 2)Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja pada Tahun 2024 sebagai berikut :

**a. Sumber Data**

Data bersumber dari Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2024 dimana pelaksanaan reveiew ini dilakukan berdasarkan data akuntabilitas dari Biro Administrasi Pembangunan selama tahun 2024 dan dilakukan evaluasi oleh Instansi terkait yang berwenang dalam pemberian nilai tersebut. Selain itu dalam pencapaian sasaran kinerja ini juga didukung oleh data primer dari pengolahan kuisioner dari indeks pelayanan dalam menjalankan aplikasi Simbangda Berbasis Evidence selama tahun 2024.

**b. Metodologi Perhitungan**

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan Reviu dan Wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Matrik 5 (lima) Tahunan, Laporan Kinerja (LKJ) dan dokumen lainnya sebagai bukti fisik.

**c. Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis II memiliki Indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilasi Kinerja dengan artinya bahwa Biro Administrasi Pembangunan berupaya untuk mencapai kinerja sasaran dengan meningkatkan kinerja ditahun 2024 dengan memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta sebagai bukti dukung dalam pelaksanaan evauasi kinerja biro.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis tersebut dengan uraian sebagai berikut:

### a. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Realisasi dari indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 3. 11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis II Tahun 2023 dan 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2023			KINERJA 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	65 ( B )	70,16 (BB)	107,94%	72 (BB)	70,71 ( BB)	98,20%

Dari tabel yang disajikan dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2023 pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja memiliki target nilai 65 dan untuk tahun 2024 dengan target nilai yaitu 72. Kemudian yang terealisasi untuk tahun 2023 yaitu 70,16 dan untuk tahun 2024 dengan realisasi nilai 70,71 dengan kategori "BB" dengan capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 107,94% persen dan untuk tahun 2024 adalah 98,20% persen dengan kategori capaian kinerja "sangat tinggi".

### b. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra

Biro Administrasi Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk sasaran strategis dengan target untuk tahun 2024 dengan nilai 72 (baik). Sedangkan dari target Biro Administrasi Pembangunan pada Renstra yaitu dari tahun 2021 s.d 2025 yaitu dengan nilai BB sedangkan pada tahun 2026 target nilai yang diberikan yaitu A sedangkan realisasi dari target tersebut sampai dengan tahun 2024 yaitu 70,71 dimana ini masih berproses dalam pencapaian targetnya sampai dengan akhir periode

RPJMD yaitu tahun 2026 dengan target yang harus di capai yaitu nilai A dan sasaran strategis ini akan masih berproses sampai dengan tahun 2026.

**c. Realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional**

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dan Target kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024**

Tahun 2021 dimana dilaksanakannya evaluasi SAKIP yaitu dengan kondisi masih Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Sekretariat Provinsi Sumatera diberikan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu nilai 59,81 (CC) sehingga pada tahun 2021 masih belum terpenuhi target Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau yaitu B. Pada Tahun 2022 diberikan nilai 60,08 (B) dengan target 61 (B), hasil penilaian masih belum mencapai target karena yang dilakukan penilaian evaluasi kinerja adalah 2 OPD yaitu Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau serta Biro Administrasi Pembangunan sehingga sulit mengukur kinerja dengan perubahan tugas pokok dan fungsi dan tidak ada pembandingan terhadap kinerja tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 yang dievaluasi yaitu data tahun 2022 dengan target 65 (B) dan mendapatkan realisasi sebesar 70,16 (BB), dimana untuk tahun 2023 target sudah terpenuhi. Kemudian untuk tahun 2024 dengan target 72 (BB) dan mendapatkan realisasi sebesar 70,71 (BB) dimana untuk tahun 2024 belum terpenuhi target akan tetapi mendapatkan nilai dengan capaian 98,20 % dengan kategori “ sangat tinggi”. Pencapaian realisasi apabila dibandingkan dengan target masih akan terus diperbaiki seiring dengan perubahan indikator pada Biro Administrasi Pembangunan karena akan dilakukan perubahan Rencana Strategis nantinya.

**Tabel 3. 12**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis II Tahun 2021 s.d 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2021			KINERJA 2022			KINERJA 2023			KINERJA 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	60	59,81	99,68 %	61	60,08	98,49 %	65	70,16	107,94 %	72	70,71	98,20 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan hasil evaluasi SAKIP mulai dari Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau sampai menjadi Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2021 yaitu dokumen yang dievaluasi yaitu dokumen tahun 2020 dimana Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dengan realisasi nilai SAKIP 59,81 (CC) dari target nilai SAKIP 60 (B) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 18,77% dimana perencanaan kinerja sudah mulai tersusun seperti Renstra telah memuat tujuan tapi masih terdapat kekurangan. IKU sudah disusun namun tidak selaras dengan Renstra
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 15,49% dimana pengumpulan data kinerja sebagai dasar penetapan dan penilaian capaian kinerja dilakukan melalui permintaan belum terdapat pedoman atau SOP. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 9,62% masih terdapat kekurangan penyajian informasi kinerja dan laporan kinerja, dimana angka yang disajikan belum akurat dan konsisten dalam mengukur capaian kinerja.

- D. Evaluasi Internal : Nilai hasil evaluasi terhadap evaluasi internal sebesar 6,19% dimana evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas evaluasi program dan kegiatan serta evaluasi terhadap capaian realisasi fisik dan keuangan namun hasil evaluasi belum terlalu berpengaruh terhadap perbaikan kualitas perencanaan
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : Nilai hasil evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 9,75% dimana terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sudah tercapai dengan rata-rata capaian di atas 100% namun capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat 1 (satu) sasaran strategis mengalami penurunan.

Kemudian untuk tahun 2022 (dokumen yang dievaluasi adalah dokumen tahun 2021) dari instansi terkait untuk Biro Administrasi Pembangunan didapatkan hasil sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 18,79 dimana perencanaan kinerja sudah baik, dimana Renstra sudah disusun dan sudah memuat tujuan, namun masih ada yang belum berorientasi hasil (outcome) seperti tujuan meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan.
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 15,07 dimana Indikator Kinerja Utaman (IKU) sudah namun belum cukup dijadikan untuk mengukur kinerja karena belum memenuhi kriteria yang seharusnya. Indikator kinerja eselon III dan IV belum keseluruhannya selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 10,15 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Capaian yang disajikan tentang pencapaian IKU masih perlu perbaikan agar menggambarkan hubungan kualitas antara outcome, output,

process dan input dan telah di upload di website Biro Administrasi Pembangunan.

- D. Evaluasi Internal : Nilai hasil evaluasi terhadap evaluasi internal sebesar 6,19 dimana telah dilakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja melalui Rencana aksi telah dievaluasi dengan kriteria terdapat informasi tentang capaian hasil rencana simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana serta terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakan.
- E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi : Nilai hasil evaluasi terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sebesar 9,88 dimana Target Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dibagi menjadi 2 (dua) perjanjian kinerja yang mana untuk kinerja Januari s.d Mei 2021 capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 43,57%. Untuk perjanjian kinerja Juni s.d Desember capaian indikator kinerja 110,16%

Sedangkan untuk 2023 dimana dokumen yang dilakukan evaluasi yaitu dokumen tahun 2022 dimana Biro Administrasi Pembangunan realisasi nilai SAKIP 70,16 (BB) dari target nilai SAKIP 65 (B) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 26,42 dimana perencanaan kinerja sudah dibuat yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) eselon 2 seluruh dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasikan pada web site Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 20,28 dimana Biro Administrasi Pembangunan telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja, dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran

dan pengumpulan data kinerja. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan

- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 10,85 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Sistematika penulisan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi tentang capaian kinerja.
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap evaluasi internal sebesar 12,62 dimana telah menyusun SOP pemantauan capaian kinerja internal dan telah dilakukan secara berjenjang terhadap seluruh unit kerja/bidang/sub bidang dan ada beberapa catatan yaitu : laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat monitoring dan evaluasi belum menyajikan rekomendasi perbaikan pengukuran capaian perjanjian kinerja dan informasi capaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 (dokumen yang dievaluasi adalah dokumen tahun 2023) dari instansi terkait untuk Biro Administrasi Pembangunan didapatkan hasil sebagai berikut :

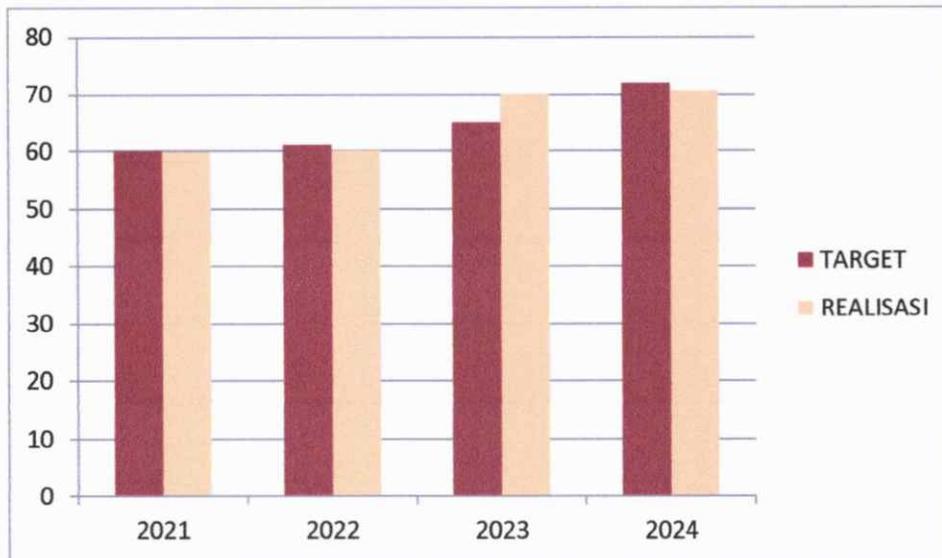
- A. Perencanaan Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar 24,39 dimana perencanaan kinerja sudah baik, dimana Renstra dan Indikator Kinerja Utama, Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja), Perencanaan aktivitas pendukung kinerja yaitu rencana aksi dan perencanaan anggaran yaitu DPA telah dibuat. Catatan yang menjadi perhatian bahwa target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai

(Achievable), kurang menantang dan kurang realistis. Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang lebih baik.

- B. Pengukuran Kinerja : Nilai hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar 21,18 dimana Biro Administrasi Pembangunan telah menyusun SOP Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- C. Pelaporan Kinerja : Nilai evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar 10,43 dimana Biro Administrasi Pembangunan sudah menyusun Laporan Kinerja dan sudah disampaikan batas waktu yang ditetapkan, Sistematis penulisan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yaitu belum menyajikan informasi efisiensi secara kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran.
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap evaluasi internal sebesar 14,71 dimana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi, dengan mengacu kepada SOP yang telah ditetapkan akan tetapi beberapa catatan yaitu pemantauan capaian kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang sampai level individu serta belum dilakukan pemantauan oleh SDM yang memadai sehingga belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dimana hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat nilainya pada grafiknya dibawah ini :

**Grafik 3**  
**Sasaran Strategis II Tahun 2021 s.d 2024**



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa realisasi yang dicapai hanya tahun 2023 yang melebihi target sedangkan tahun 2021 dan 2022 masih belum tercapai target. Tahun 2024 perlu masih belum mencapai target sehingga tahun 2025 diupayakan untuk peningkatan agar dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

#### **e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan**

Adapun penyebab dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Adanya keselarasan antara perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga kebutuhan dokumen evaluasi untuk SAKIP dapat terpenuhi.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang baik dalam memilih program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

3. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam sinergisitas antara perencanaan dengan penganggaran.
4. Adanya peningkatan penginputan evidence kegiatan pada aplikasi Simbangda oleh Perangkat Daerah Provinsi dan tepat waktunya penyerahan laporan dari Kabupaten/Kota..
5. Pelaksanaan rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan lingkup asisten dan dilanjutkan ke tingkat Pembangunan (gubernur) yang dilakukan setiap bulannya,
6. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi sehingga pencapaian target dapat dipenuhi untuk SAKIP Biro Administrasi Pembangunan.
7. Adanya dukungan dari bagian-bagian untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP Biro Administrasi Pembangunan.

Disamping itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Menyusun dokumen perencanaan yang bersenergi dengan penganggaran sehingga dapat saling mendukung pelaksanaan kegiatan.
  2. Mensortir semua kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan dan penganggaran
  3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi dari ASN dalam menyusun dan melaksanakan akuntabilitas kinerja
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.
  5. Membuat Standar Pelayanan terhadap pelayanan internal organisasi
  6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelayanan internal.
- f. Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini sebanyak 1 program yaitu Program Penunjang Pemerintah



Daerah Provinsi dengan satu kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sementara kegiatan yang lain juga saling bersinergi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang bersangkutan, namun dalam rangka peningkatan capaian kinerja masih tetap diperlukan kegiatan lain sebagai pendukung untuk mencapai target indikator kinerja dimaksud.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan selama tahun 2024 yang mendukung sasaran strategis II (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi) yaitu Program Penunjang Pemerintah Provinsi Daerah dengan 1 Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 13**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung**  
**Sasaran II "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi"**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Th 2024	REALISASI		
			Fisik	Rp.	%
I	Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi	1.416.822.301	100.00	1.348.651.931	95.19
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.342.000	100.00	87.914.300	81.15
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.949.800	100.00	66.204.300	88.33
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.490.000	100.00	5.234.000	69.88
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.902.200	100.00	16.476.000	63.61

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis II Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi didukung dengan 1 Program dan 1 Kegiatan serta dengan 3 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 108.342.000,- Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan realisasi anggaran sebanyak Rp 87.914.300,- dengan capaian

sebesar 81,15%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 20.427.700,- (18,85%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (98,20%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90,01%)

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp. 108.342.000

CK = Capaian Kinerja (%) = 98.20%

RA = Realisasi Anggaran = Rp. 87.914.300

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Rp.}108.342.000 \times 98.20\%) - \text{Rp.}87.914.300}{\text{Rp.}108.342.000} \times 100\%$$

$$\text{Ting Efisiensi} = \frac{10.639.184.400 - 87.914.300}{\text{Rp.}108.342.000} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = 92.64 %

Cara menghitung efisiensi :

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja		Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$		$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} \times 20 \times 50)$
Sasaran 1	1.370.375,350	1.180.009,880	107,47%	0,23		107,05%
Sasaran 2	108,342,000	87,914,300	98,20%	0,17		92,64%

Dari pagu anggaran untuk Sasaran II sebesar Rp. 108.342.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 87.914.300,- dan capaian kinerja mencapai 98,20%. Dalam melaksanakan Sasaran II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.427.700,- (1.8%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja Sasaran II “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dapat disimpulkan bahwa Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai efisiensi sebesar 92,64% dengan anggaran yang tersedia diperoleh nilai efisiensi 0,17 yang artinya dengan

anggaran Rp. 108.342.000 Biro Administrasi Pembangunan termasuk dapat menggunakan anggaran dengan efisien.

Efisiensi yang dilakukan dengan melakukan penghematan terhadap penggunaan kertas, mengurangi rapat-rapat secara langsung dan melakukan perjalanan dinas sesuai penting tidaknya perjalanan dinas yang dilakukan.

### **III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**

Biro Administasi Pembangunan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dimana untuk menjalankan Permendagri ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat langsung menyusun Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian terdapat juga beberapa kali mengalami perubahan. Peraturan Gubernur yang disusun ini salah satunya menyusun Tugas Pokok dan Fungsi dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi serupakan sasaran ke 3 (tiga) bagi Biro Administrasi Pembangunan. Dimana juga tertuang dalam Renstra 2021- 2026 dan Renja tahun 2024, sehingga pada RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat termasuk pada misi 7 (tujuh).

#### **a. Dasar Penetapan Indikator Kinerja**

Biro Administrasi Pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 mendukung misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta berkualitas sehingga untuk sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator ***Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.***

Target untuk tahun 2024 pada sasaran strategis sudah ditetapkan dan juga sudah dituangkan dalam Renstra dan Renja Biro Administrasi Pembangunan, adapun target tahun 2024 indikator kinerja sebesar 85 (Baik). Pada saat pelaksanaan pelayanan maka diperoleh realisasi indikator kinerja terhadap sasaran ke 3 (tiga) seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 3. 14**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran III**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.	83,31	89,53	107,46

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 107,22% dengan kategori memuaskan. Pencapaian indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu dari target nilai 83,31 dengan realisasi nilai diangka 89,53 di tahun 2024 ini dan capaian ini dikategorikan kedalam capaian yang **sangat baik** sesuai dengan Permenpan 14 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI</b>	<b>KINERJA PELAYANAN</b>
1.	25,00 - 64,99	Tidak Baik
2.	65,00 - 76,60	Kurang Baik
3.	76,61 - 88,30	Baik
4.	88,31 - 100	Sangat Baik

### **a. Sumber Data**

Data bersumber dari data primer yaitu penyebaran kuisiner melalui google chrome yang diinformasikan ke grup Whatsapp Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Banyaknya kuisiner yang disebar kemudian kuisiner tersebut diolah dan dilakukan penghitungan sesuai dengan arahan dari Permenpan Nomor 14 Tahun 2017.

### **b. Metodologi Perhitungan**

Pengukuran kualitas pelayanan organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan melalui pengisian kuisiner kepada Perangkat Daerah ( OPD Provinsi ) dan Kabupaten/Kota sebagai OPD yang dilayani oleh Biro Administrasi Pembangunan. Adapun jumlah Kuisiner yang disampaikan berjumlah 9 pertanyaan.

Responden yang diberikan kuisiner dibagikan kepada 50 OPD Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota. Dari kuisiner yang diberikan dapat dilakukan rekapitulasi sebagai bahan untuk memperoleh nilai tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Biro. Adapun beberapa unsur yang dipertanyakan pada kuisiner sebagai berikut :

- a. Prosedur pelayanan
- b. Persyaratan dan jenis pelayanan
- c. Kesesuaian persyaratan
- d. Kejelasan informasi
- e. Jumlah personil yang melayani
- f. Sarana pendukung dstnya

Dari unsur pertanyaan yang dijawab pada kuisiner tersebut akan memperoleh hasil responden kuisiner yang akan dipergunakan sebagai indikator kinerja biro. Responden yang mengisi kuisiner survey pelayanan kepuasan berjumlah 60 orang dengan rekapitulasi pengisian kuisiner sebagai berikut :

**Tabel 3. 15**  
**Tabel Rekapitulasi Kuisisioner**

No Responden	Pertanyaan									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	29
4	3	2	2	3	3	3	2	3	3	24
5	4	4	4	4	3	4	4	3	3	33
6	3	3	4	4	4	3	4	4	4	33
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
9	4	3	3	3	3	4	4	3	4	31
10	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
11	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
13	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
14	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
15	3	4	4	4	3	4	4	3	3	32
16	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33
17	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34
18	4	4	4	4	3	4	3	4	3	33
19	3	3	4	4	3	3	4	3	3	30
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
21	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33
22	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
23	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
24	3	4	4	4	3	3	4	3	3	31
25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
26	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
29	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
30	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
31	4	4	4	4	3	4	3	3	3	32
32	4	4	3	3	3	3	3	3	4	30
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	3	4	3	3	4	4	3	3	3	30
36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
38	3	3	4	4	3	4	4	4	3	32
39	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
40	3	3	4	3	4	4	4	3	3	31
41	4	4	3	3	4	4	3	3	3	31
42	3	3	3	3	3	4	4	3	3	29
43	4	4	4	4	3	4	3	3	3	32
44	3	3	4	3	3	4	3	3	4	30
45	3	3	3	3	3	4	3	4	4	30
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
48	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33
49	4	3	4	3	3	4	3	3	3	30
50	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	4	4	3	3	3	4	3	4	4	32
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
54	4	3	4	4	4	4	3	4	3	33
55	3	4	4	3	3	3	2	3	3	28
56	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
57	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
58	4	4	4	4	4	3	3	3	3	32
59	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
Jumlah	210	219	226	218	207	214	213	212	215	<b>1934</b>
	<b>4</b>	<b>3.88</b>	<b>4</b>	<b>3.8</b>	<b>3.82</b>	<b>4</b>	<b>3.88</b>	<b>3.67</b>	<b>3.44</b>	

Total Nilai Pertanyaan 36 (nilai maksimal) X responden = ...

$$36 \times 60 = 2160$$

$$\text{NILAI IKM} = \frac{1934}{2160} \times 100\% = 89,53$$

Dari perhitungan nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) tersebut dapat di buat tabel Tingkat kepuasan Pelayanan Organisasi sebagai berikut :

**Tabel 3. 16**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Organisasi**  
**Yang Akuntabilitas Kinerja dan Melayani Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Kode
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (83,31)	SB (89,53)	107,46	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja					107,46		

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bernilai **107,46% dengan artian Sangat Baik.**

**c. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024**

Realisasi dari indikator Kinerja Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. 17**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Sasaran Strategis III Tahun 2023 dan 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KINERJA 2023			KINERJA 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	83	85,93	103,53%	83,31	89,53	107,46

Dari table yang disajikan dapat dilihat Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun 2023 pada sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi memiliki target nilai kepuasan sebanyak 83 dan untuk tahun 2024 dengan target nilai 83,31 Kemudian yang terealisasi untuk tahun 2023 yaitu 85,93 dengan kategori "Sangat Baik" dan untuk tahun 2024 dengan realisasi

nilai sebanyak 89,53 dengan kategori “Sangat Baik” dengan capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 103,53% dan untuk tahun 2024 adalah 107,46% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

**d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen Renstra**

Biro Administrasi Pembangunan mulai melakukan penilaian terhadap Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 18**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran III**  
**Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi**  
**Tahun 2021 s.d 2024 dengan dokumen Renstra**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)				Target Akhir Renstra	Capaian s.d Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra (%)	KET
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	80	83	83,31	NA	88.33	85.93	89.53	NA	110.28	103.53	107.46	8 (75)	119.37	
Rata-rata Capaian Sasaran III											NA	110.28	103.53	107.46			
KRITERIA PENILAIAN											SANGAT BAIK						

Berdasarkan tabel diatas bahwa Biro Administrasi Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator **Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi** untuk target dari tahun 2022 Sangat Baik, tahun 2023 mengalami penurunan dan 2024 mengalami peningkatan terhadap realisasi. Dimana 2022 target 80 memperoleh realisasi 88.33 kategori Sangat Baik dengan capaian indikator kinerja 110.28 dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Tahun 2023 dengan target 83 dan terealisasi 85,93 dengan ketegori Baik dan capaian indikator kinerja 103,53. Terjadinya penurunan di tahun 2023 karena terdapatnya refofusing. Untuk tahun 2024 memiliki target 83.31 dengan realisasi 89,53 dengan kategori Sangat Baik dan capaian kinerja indikator sebesar 107.46 dengan ketegori tinggi.

Sedangkan perbandingan dengan dokumen Renstra capaian kinerja indikator mengalami kenaikan sebesar 119,37% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Terjadinya peningkatan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 2024 oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena responen sudah mulai memahami pelayanan yang diberikan Biro Administrasi Pembangunan kepada Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah dan kepada Kabupaten/Kota.

#### **e. Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

Mengingat tidak adanya target nasional untuk pencapaian sasaran strategis ini, maka perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target nasional tidak dapat digambarkan.

#### **f. Perkembangan Indikator Kinerja dari Tahun 2021 s.d 2024**

Indikator Kinerja yang akan dilihat Pada Bagian ini yaitu Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan mengukur tingkat kepuasan dari stakeholder yaitu ASN lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan pelayanan administrasi pengendalian pembangunan. Cara pengukuran indeks ini dengan menyebarkan kusionser kepada seluruh ASN melalui google crome yang disebarakan melalui whatsapp grup Simbangda Berbasis Eviden, Grup Penatausahaan dan Grup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang mana hasil indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

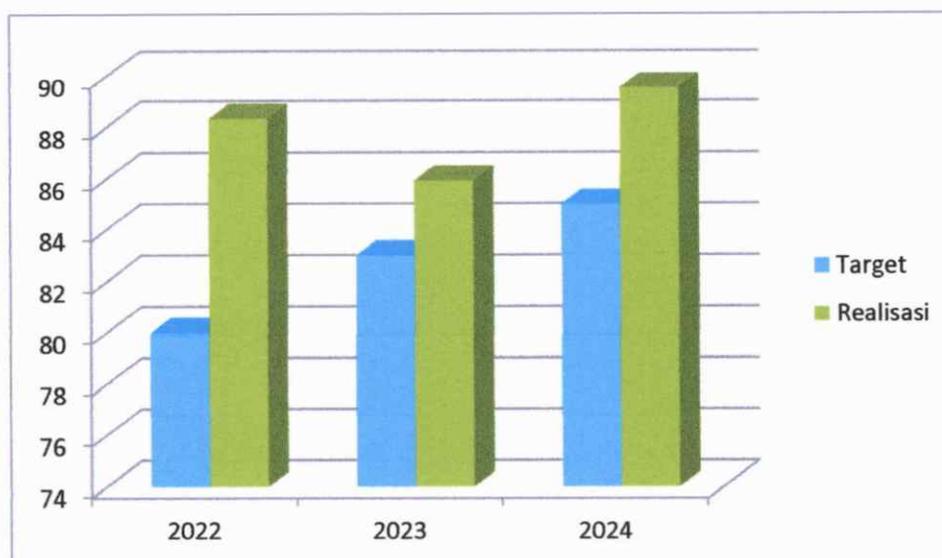
**Tabel 3. 19**  
**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja**  
**Sasaran III Tahun 2021 s.d 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	NA	80	83	83.31	NA	88.33	85.93	89.53	NA	110.28	103.53	107.46
Rata-rata Capaian Sasaran III											NA	110.28	103.53	107.46
KRITERIA PENILAIAN											SANGAT BAIK			

Pada tahun 2021 Biro Administrasi Pembangunan belum mempunyai target karena saat itu belum ada muncul di Renstra Biro. Untuk 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan terhadap target dan untuk realisasi mengalami penurunan. Dimana 2022 target 80 memperoleh realisasi 88.33 kategori Sangat Baik dengan capaian indikator kinerja 110.28% dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Tahun 2023 dengan target 83 dan terealisasi 85,93 dengan ketegori Baik dan capaian indikator kinerja 103,53% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Terjadinya penurunan di tahun 2023 karena terdapatnya refofusing anggaran tahun 2023. Untuk tahun 2024 memiliki target 83.31 dengan realisasi 89,53 dengan kategori Sangat Baik dan capaian kinerja indikator sebesar 107.46% dengan ketegori “Sangat Tinggi”.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III terhadap Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2021 s.d 2024 dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 4**  
**Sasaran Strategis III Tahun 2022 s.d 2024**



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan Biro Administrasi Pembangunan sudah memuaskan Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

#### **g. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Yang Telah Dilakukan**

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan pencapaian ini adalah karena:

1. Biro Administrasi Pembangunan sudah menyiapkan kuisoner dan semua keperluan dalam melakukan tabulasi nilai IKM untuk layanan pengendalian administrasi pembangunan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
2. Biro Administrasi Pembangunan yang cepat dalam penyebaran penghitungan kuisoner yang telah disebarakan melalui google crome.
3. Adanya dukungan dari semua pihak dalam melakukan penghitungan kuisoner pengendalian administrasi pembangunan.

4. Sarana dan prasarana yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran kuisisioner dan perekapan kuisisioner.
5. Adanya rekapitulasi hasil kuisisioner yang disebarakan melalui google crome.

**g. Analisis Atas Efisien Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan**

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tidak memiliki program, kegiatan dan sub kegiatan khusus untuk mendukung sasaran tersebut sehingga tidak membutuhkan biaya dalam mewujudkan sasaran dan mencapai indikator kinerja.

**3.4 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024**

Pada tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran murni sebesar Rp. 2.987.197.651,- sedangkan pada perubahan anggaran menjadi Rp. 2.787.197.651,-. Anggaran tersebut diperuntukan untuk 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Sampai konsidi akhir tahun 31 Desember 2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah merealisasi anggaran sebesar Rp. 2.508.661.591,- atau sebesar 90,01%. Adapun realisasi anggaran Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 3. 20**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp. 2.787.187.651</b>	<b>Rp. 2.508.661.591,-</b>	<b>90,01</b>
I	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Rp. 1.416.822301,-</b>	<b>Rp. 1.348.651.931,-</b>	<b>95,19</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 108.342.000,-</b>	<b>Rp. 87.914.300,-</b>	<b>81,15</b>
1.a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 74.949.800,-	Rp. 66.204.300,-	88,33
1.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.490.000,-	Rp. 5.234.000,-	69,88

1.c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 25.902.200,-	Rp. 16.476.000,-	63,61
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 100.359.000,-</b>	<b>Rp. 98.352.000,-</b>	<b>98,00</b>
2.a	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 93.360.000,-	Rp. 93.360.000,-	100
2.b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 22.710.000,-	Rp. 19.589.600,-	71,32
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 19.410.000,-</b>	<b>Rp. 19.304.405,-</b>	<b>86,26</b>
3.a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 18.400.000,-	Rp. 16.359.600,-	88,91
3.b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 4.310.000,-	Rp. 3.230.000,-	74,94
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 100.800.000,-</b>	<b>Rp. 100.797.800,-</b>	<b>100</b>
4.a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 100.800.000,-	Rp. 100.797.800,-	100
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 915.400.363,-</b>	<b>Rp. 875.195.730,-</b>	<b>95,61</b>
5.a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 146.464.045,-	Rp. 124.860.000,-	85,25
5.b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 12.950.400,-	Rp. 12.360.500,-	95,44
5.c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 77.651.340,-	Rp. 66.440.000,-	85,56
5.d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.060.000,-	Rp. 18.060.000,-	100
5.e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 660.274.578,-	Rp. 653.475.230,-	98,97
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 83.020.938,-</b>	<b>Rp. 82.557.586,-</b>	<b>99,44</b>
6.a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.900.000,-	Rp. 3.900.000,-	100
6.b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 79.120.938,-	Rp. 78.657.586,-	99,41
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 86.190.000,-</b>	<b>Rp. 84.224.915,-</b>	<b>97,74</b>
8.a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 71.100.000,-	Rp. 69.154.915,-	97,26
8.b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 15.090.000,-	Rp. 15.090.000,-	100
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Rp. 1.370.375.350,-</b>	<b>Rp. 1.160.009.660,-</b>	<b>84,65</b>
<b>1</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 835.393.950,-</b>	<b>Rp. 708.234.092,-</b>	<b>84,78</b>
1.a	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Rp. 240.601.400,-	Rp. 188.131.953,-	78,19
2.b	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Rp. 217.035.300,-	Rp. 196.397.614,-	90,49
3.c	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Rp. 377.757.250,-	Rp. 323.704.525,-	85,69
<b>2</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Rp. 534.981.400,-</b>	<b>Rp. 451.775.568,-</b>	<b>84,45</b>
2.a	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Rp. 54.661.200,-	Rp. 40.493.500,-	74,08
2.b	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 287.991.450,-	Rp. 267.739.499,-	92,97
2.c	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Rp. 192.328.750,-	Rp. 143.542.569,-	74,63

**Realisasi anggaran Per Program yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja.** Sebagai salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dengan

melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran pada masing-masing program. Secara terperinci pagu alokasi anggaran setiap program dan ketercapaian penyerapan pada masing-masing program dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3. 21**  
**Realisasi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja tahun 2024			Program	Anggaran Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal	Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten / kota yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan	93%	99.95%	107.47	Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.370.375.350	1.160.009.660	84.65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	B (72)	BB (70,71)	98.20	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.416.822.301	1.348.651.931	95.19
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	SB (83.31)	B (89.53)	107.46				
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>104.37</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>2,036,614,339</b>	<b>1,951,418,693</b>	<b>90.01</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa :

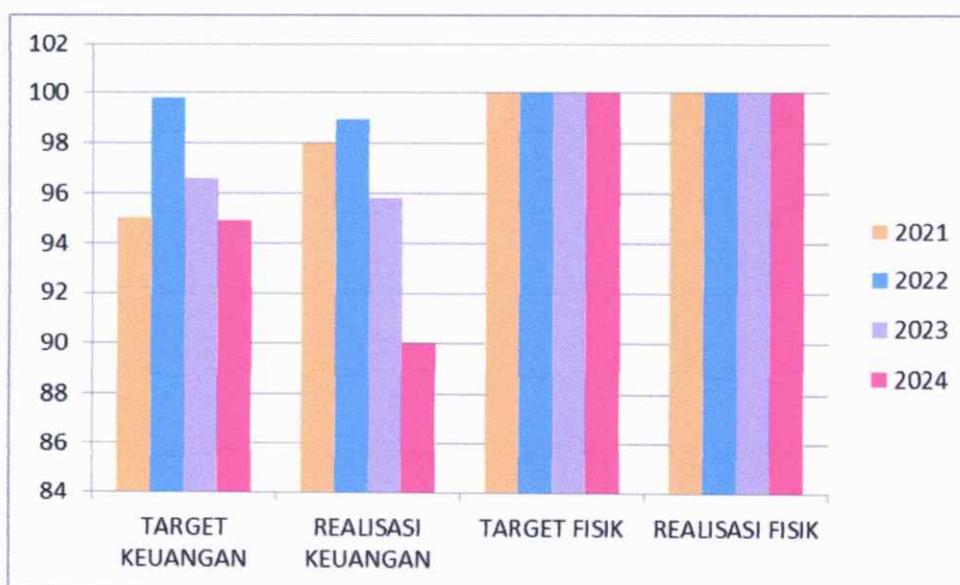
1. Penggunaan anggaran sebesar 90,01% tersebar pada 2 (dua) program dapat tercapai kinerja oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan capaian kinerja sebesar 103,66 %. Hal tersebut diartikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dengan anggaran pendukungnya telah berhasil maksimal dalam mencapai 3 (tiga) sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan yaitu Mewujudkan Pengendalian Pembangunan Yang Optimal dengan indikator Persentase perangkat daerah dan pemerintah kabupaten / kota

yang tertib administrasi pelaksanaan pembangunan, Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

2. Serapan anggaran tahun 2024 pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dengan serapan sebesar 84,65% dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serapan sebesar 95,19%.

Perbandingan antara target dengan realisasi keuangan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

**Grafik 5**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan**  
**Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024**



Pada grafik diatas dapat diartikan bahwa untuk target fisik dan realisasi fisik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%. Untuk realisasi keuangan tahun 2021 dapat melebihi target. Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 realisasi keuangan tidak tercapai sesuai target karena kondisi

keuangan sejak tahun 2022 sampai 2024 yang tidak stabil sehingga dilakukan refofusing anggaran dan menyebabkan realisasi keuangan rendah dari target.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas untuk tahun 2024 Biro Administrasi Pembangunan secara keseluruhan pencapaian kinerja Tahun 2024 dapat disimpulkan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang diukur berdasarkan rata-rata capaian kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang pelaksanaannya Bulan Januari s.d Desember 2024 dengan hasil capaian kinerja sebesar **104,37%**
2. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi Simbangda bagi seluruh OPD Provinsi agar dapat terlaksananya tertib administrasi pembangunan yang mana seluruh OPD malakukan tahapan upload dokumen sebagai data dukung dan ketepatan waktu melaksanakan tertib pelaksanaan administrasi pembangunan.
3. Usaha yang dilakukan dalam rangka dalam rangka mewujudkan indikator kinerja terhadap ***Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota Yang tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan*** melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat menyerahkan laporan pelaksanaan pembangunannya dengan tepat waktu.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2024. Dengan kata lain

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahan masalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang agar sasaran startegis yang ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

#### **4.2 Permasalahan dan Kendala**

Pencapaian kinerja untuk tahun 2024 terhadap pelaksanaan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan terhadap anggaran yang disesuaikan dengan Perjajian Kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang dialami selama tahun 2024 antara lain :

- a. Dibutuhkan peraturan atau regulasi terhadap Pengendalian Administrasi Pembangunan yang terbaru.
- b. Pelaksanaan monev masih menyentuh sebagian kecil dari paket pekerjaan yang ada, sehingga untuk mengambil kesimpulan dengan sampel yang sedikit itu tentunya kurang valid.
- c. Kurangnya sarana mobilitas sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan. Idealnya monev yang dilaksanakan selain yang terencana dengan melibatkan SKPD terkait sewaktu-waktu juga perlu dilaksanakan Sidak. Sehingga dapat dilihat kondisi asli dilapangan seperti apa. Hal ini tentunya harus didukung oleh sarana mobilitas yang ideal dalam pelaksanaannya.
- d. Perlu adanya sinkronisasi dari beberapa OPD dalam pengendalian administrsi pelaksanaan pembangunan sebuah kegiatan baik dalam sisi pelapoan pelaksanaan kegiatan, terutama sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari dana perimbangan.

- e. Perlu adanya perencanaan yang matang dari OPD dalam melaksanakan kegiatan, terutama OPD yang memiliki sumber dana dari APBD dan APBN agar ada time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi padatnya pelaksanaan kegiatan diakhir tahun anggaran.
- f. Terjadinya gagal lelang, sehingga pemda harus mengulang proses lelang yang pada akhirnya menghambat penyerapan anggaran dan pencapaian output.
- g. Pada umumnya SKPD belum mengentrykan permasalahan dan rencana tindak lanjut di dalam sistem
- h. Data yang dilaporkan pada Aplikasi Simbangda agar update dan valid
- i. Belum optimalnya penyelesaian proses lelang karena adanya review HPS untuk pekerjaan Kontruksi.
- j. Masih adanya keterlambatan DAK yang belum selesai akibat kelalaian dari SKPD sehingga mengakibatkan kerugian pada daerah
- k. Belum lengkapnya dokumen/bukti yang harus diupload kedalam system
- l. Masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dan proses tender yang belum keluar izinya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.
- m. Terkait Adanya Sub Kegiatan baru yang tidak dapat diinput karena OPD belum mengentahui tata cara entry kegiatan tambahan.
- n. Sehubungan adanya perbedaan realisasi fisik dan realisasi keuangan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan total realisasi antar fisik dan keuangan, dan sudah dilakukan rumusan dengan pemberian bobot terhadap realisasi fisik maupun realisais keuangan, sehingga terdapat keseimbangan terhadap realisasi fisik maupun keuangan.
- o. Terkait adanya OPD yang merubah paket kegiatan menjadi rutin, sehingga perlu dilakukan penguncian terhadap kegiatan tertentu termasuk kegiatan pada program penunjang pemerintah pada anggaran rutin.
- p. Terkait adanya penyatuan paket kegiatan yang seharusnya tidak disatukan.

Dari masalah yang disampaikan diatas dapat juga memperlambat proses pelaksanaan aplikasi Simbangda pada masing-masing OPD sehingga dapat memperlambat pelaksanaan proses tertib administrasi pembangunan. Karena keterlambatan dalam proses upload data ke aplikasi Simbangda menyebabkan lambatnya semua proses administrasi.

### **1.1 Langkah-Langkah yang Dilakukan Masa Mendatang**

Dengan pencapaian kinerja tahun 2024 yang telah dilakukan Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka mewujudkan 3 sasaran strategis dengan anggaran terbatas masih dibutuhkan langkah-langkah yang akan dilakukan masa mendatang sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan proses pembuatan Peraturan Gubernur terhadap Pengendalain Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
- b. Perlunya memperbarui beberapa peraturan terkait pembangunan di Sumatera Barat seperti peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, peraturan tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan lewat tahun anggaran, peraturan tentang proyek strategis/tahun jamak. Sehingga ada kepastian hukum dan pegangan bagi pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- c. Monev yang dilaksanakan harus menyentuh seluruh paket pekerjaan yang ada, sehingga mendapatkan kesimpulan yang valid.
- d. Perlu ditingkatkan sinkronisasi dari beberapa OPD yang mempunyai paket pekerjaan banyak sehingga terlaksana pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan yang diharapkan pada aplikasi Simbangda.
- e. Perencanaan yang matang dari OPD terhadap rencana kegiatan dan sumber dana yang dialokasikan agar time schedule pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pelaksanaan.

f. Melakukan sinkronisasi pelaksanaan aplikasi Simbangda dengan aplikasi yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa untuk mempermudah melakukan pendataan paket pekerjaan menggunakan kontrak kerja.

Dari langkah-langkah yang direncanakan untuk tahun depan diharapkan dapat terlaksana dengan perencanaan yang sudah disusun dengan baik.